

Dosen Pembimbing

Drs. Artono, M. Hum

NIP. 19650604 199302 1 001

PERJUANGAN M. NATSIR DALAM MEREKUT IRIAN BARAT 1950-1951**Nuura Nurida Fasa (084284244)**

S1 Pend. Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, UNESA (naura.pasha@gmail.com)

ABSTRAK

Setelah Proklamasi 1945, Belanda menyisakan satu permasalahan dengan Indonesia tentang status Karesidenan Irian Barat. Sejak pemulihan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949, Irian Barat masih dalam kekuasaan Belanda. Statusnya akan dirundingkan dalam satu tahun sejak pemulihan kedaulatan RIS oleh Belanda. Setelah pemulihan kedaulatan terjadi kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Belanda untuk membentuk suatu Unie Indonesia-Belanda. Belanda menyerahkan semua daerah bekas jajahannya, kecuali Papua. Dalam pembebasan Irian Barat, tokoh yang gigih memperjuangkan Irian Barat adalah M. Natsir, sebagai Perdana Menteri pertama RI setelah berakhirnya RIS. Kabinet Natsir mendapat tugas, untuk menyelesaikan masalah Irian Barat sebelum 1 Januari 1951. Masa pemerintahan Kabinet ini bertepatan dengan satu tahun penyerahan kedaulatan, dimana perundingan status Irian Barat akan dibuka kembali. Penelitian ini menjawab rumusan masalah, bagaimana kebijakan M. Natsir terkait masalah Irian Barat, dan respon masyarakat terhadap kebijakan M. Natsir. Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik Sumber, interpretasi, dan historiografi. Untuk menyelesaikan masalah ini, M. Natsir membentuk panitia khusus, untuk melakukan perundingan dengan Belanda. Usaha ini menemui kegagalan dan menimbulkan mosi tidak percaya dari berbagai pihak terutama Persatuan Pemuda Demokrat Indonesia Cabang Medan, dan Sumbawa, dan menuntut pembubaran Kabinet. M. Natsir yang akhirnya mengundurkan diri pada 20 Maret 1951.

Kata Kunci: Irian Barat, Kebijakan M. Natsir, Mosi Tidak Percaya

ABSTRACT

After the Proclamation of 1945, the Dutch left Indonesia a problem with the residency status of West Irian. Since the restoration of sovereignty on December 27, 1949, West Irian still in Dutch power. His status will be negotiated within one year of the restoration of sovereignty by the Dutch RIS. After the restoration of the sovereignty of an agreement between the government of Indonesia and the Netherlands to form a Unie Indonesia and the Netherlands. Dutch surrender all of the former colonies, except for Papua. In the liberation of West Irian, a character who is determined to fight West Irian M. Natsir, as the Prime Minister of the Republic of Indonesia after the end of the RIS. Cabinet Natsir given the task, in order to resolve the issue of West Irian before January 1, 1951. The reign cabinet a year to coincide with the transfer of sovereignty, which the West Irian status negotiations to be reopened. This study answers the formulation of the problem, how policy M. Natsir related problems of West Irian, and public response to the policy of M. Natsir. The method used is the method of historical research that consists of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. To resolve this masala, M. Natsir formed a special committee to conduct negotiations with the Dutch. This effort was doomed to failure and cause a motion of no confidence from the various parties, especially the Democratic Youth Union Branch Medan Indonesia, and Sumbawa, and demanded the dissolution of the Cabinet. M. Natsir who eventually resigned on March 20, 1951.

Keywords: West Irian, M. Policy Natsir, Mosi not Believe

PENDAHULUAN

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945, Indonesia belum merdeka seutuhnya. Daerah yang statusnya masih menjadi perdebatan antara pihak Indonesia dan Belanda, menjadi penghambat Indonesia untuk menyusun sistem pemerintahan yang baik. Daerah yang masih menyisakan persoalan dengan Belanda adalah, status Karesidenan Irian Barat. Daerah yang didominasi oleh penduduk berkulit hitam ini, ternyata memiliki sejuta pesona alam dan kekayaan alam berupa bahan tambang yang luar biasa. Wajar jika banyak negara yang ingin menguasai daerah tersebut termasuk Belanda.

Irian Barat secara astronomis, berada pada garis lintang $0^{\circ} 19'$ sampai $10^{\circ} 43'$ Lintang Selatan dan $130^{\circ}45'$ sampai $150^{\circ} 48'$ Bujur Timur. Secara geografis, Irian Barat berbatasan dengan Samudera Pasifik di sebelah Utara, Negara Papua Nugini di sebelah Timur, Laut Arafuru di Selatan dan Laut Seram di Barat.¹

Usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik dengan Belanda yaitu dengan diadakannya Konferensi Meja Bundar pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag Belanda. Indonesia diwakili oleh Moh. Hatta yang mendominasi acara selama perundingan berlangsung. Berdasarkan hasil perundingan antara Indonesia dengan Belanda, telah disepakati bersama antara keduanya untuk membentuk suatu Uni Indonesia-Belanda, dimana Ratu Belanda sebagai pemimpin simbolis. Soekarno akan diangkat menjadi Presiden RIS, dan Hatta sebagai wakil merangkap Perdana Menteri.² Berbagai jaminan diberikan kepada penanaman modal Belanda di Indonesia, dan disepakati bahwa akan diadakan perundingan mengenai beberapa masalah keuangan. Belanda juga akan tetap mempertahankan kedaulatan atas Papua sampai ada perundingan lebih lanjut mengenai status wilayah tersebut.

Sampai pada tanggal 27 Desember 1949, pemerintah Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan Indonesia, tidak termasuk Papua kepada RIS.³ Masalah Irian Barat akan dibicarakan kembali dalam suatu perundingan Uni Indonesia-Belanda dalam waktu satu tahun setelah penyerahan kedaulatan. RIS dipimpin oleh Soekarno sebagai Presiden, dan Moh. Hatta sebagai

Perdana Menteri, merangkap wakil Presiden. Negara RIS dibentuk seperti negara bagian yang terdiri dari 17 negara. Berdasarkan keputusan tersebut terlihat jelas, bahwa Belanda sebenarnya tidak ingin menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia, dan ingin memecah belah Indonesia.

Alasan Belanda terus mempertahankan Irian Barat adalah, karena Irian Barat tidak memiliki kemiripan fisik dengan orang Indonesia. Irian Barat lebih bersifat Melanesia, Polynesia, atau Australia. Akan tetapi Belanda tidak mengemukakan persamaan Austronesia, antara daerah dan penduduk asli Irian Barat dengan wilayah dan bangsa Indonesia selebihnya, karena hal itu adalah percobaan yang sia-sia saja bagi Indonesia.⁴

Tuntutan Belanda terhadap Irian Barat, bertujuan untuk menjadikan Irian Barat sebagai daerah kolonial, dan melanjutkan kolonialisme di Pantai Pasifik. Sedangkan tuntutan Indonesia kepada pemerintah Belanda atas status Irian Barat adalah sebagai perjuangan kemerdekaan, yaitu membebaskan bangsa dan tumpah darah Indonesia dari tangan penjajah, seperti yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Sikap Belanda yang tidak memenuhi tuntutan Indonesia dengan jalan perundingan atas masalah Irian Barat itu, tidak hanya membahayakan kerjasama hubungan persahabatan Indonesia dengan Belanda, tetapi juga melanggar hukum keadilan di Indonesia, karena Irian merupakan bagian dari wilayah Indonesia.

Usaha pemerintah Indonesia untuk merebut kembali wilayah Irian Barat, terus diupayakan. Pada masa Kabinet Hatta telah dibentuk sebuah komisi gabungan, untuk menyelesaikan persengketaan Irian Barat dengan Belanda. Tugas utama komisi gabungan adalah melakukan peninjauan ke Irian Barat, untuk menyelidiki kondisi penduduk, dan juga kegiatan pemerintah Belanda yang berada di Irian. Laporan dari masing-masing komisi, akan dijadikan bahan perundingan dalam rapat Uni.

Setelah diadakan rapat Uni antara Indonesia dengan Belanda tanggal 1 April 1950, telah disepakati bahwa pemerintah Belanda berjanji akan mempelajari lebih dalam usul pemerintah Indonesia, agar Irian diizinkan mengirimkan suatu komisi menurut mosi Parlemen Indonesia. Tetapi dalam hal ini Indonesia tidak menerima kelanjutannya. Dengan ini Komisi Irian Bagian Indonesia akhirnya mengambil beberapa keputusan, dimana salah satu dari keputusan tersebut menegaskan

¹ *Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 7*. 1988. Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka. hlm. 236.

² Ricklefs, M.C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi. hlm. 487.

³ Ricklefs, M.C, *Ibid.*, hlm. 488.

⁴ Komisi Gabungan Irian Bagian Indonesia, 1950. *Penyelesaian Persengketaan Irian Barat*. Scheveningen. hlm. 80.

bahwa jika paling lambat tanggal 27 Desember 1950 tidak juga diperoleh suatu ketetapan dengan jalan perundingan, untuk menentukan kedudukan kenegaraan daerah Irian Barat, maka menurut Piagam Penyerahan pasal 2, mengenai status quo Irian Barat tidak dapat dilanjutkan lagi oleh Pemerintah Belanda.⁵

Setelah Kabinet RIS berakhir, sistem pemerintahan juga berubah. Dari yang semula berupa negara federal, kembali menjadi Negara Kesatuan RI. Hatta mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Presiden Soekarno sering mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil partai besar pada saat itu, untuk membicarakan komposisi dan program kabinet yang akan dibentuk. Dalam pembicaraannya, Presiden juga membahas tentang siapa orang yang akan diberi tanggung jawab untuk membentuknya.

Presiden kemudian menggunakan hak prerogatifnya pada tanggal 21 Agustus 1950, untuk menunjuk M. Natsir sebagai Perdana Menteri sekaligus formatur kabinet pertama sesudah RIS.⁶ Pada masa peralihan RIS ke RI banyak sekali masalah dalam negeri yang harus diperbaiki, terutama masalah Masalah Irian Barat yang merupakan peninggalan dari KMB.

Masa pemerintahan Kabinet Natsir bertepatan dengan 1 tahun penyerahan kedaulatan Belanda, terhadap Indonesia yang meliputi seluruh wilayah bekas jajahan Belanda kecuali Papua. Sebelumnya Belanda telah berjanji akan membicarakan kembali masalah status Irian Barat, dengan jalan perundingan dalam waktu satu tahun setelah penyerahan kedaulatan. Peristiwa ini terhitung sejak 27 Desember 1949 sampai 27 Desember 1950. Oleh karena itu Presiden Soekarno memberikan tugas kepada Kabinet Natsir, untuk menyelesaikan masalah Irian Barat sebelum ayam berkokok pada 1 Januari 1950.

Kabinet Natsir membawa beban tugas mengembalikan situasi revolusi menuju pemerintahan yang demokrasi, sedangkan situasi politik negara belum stabil. Sehingga dalam pelaksanaan kebijakannya mengenai masalah Irian Barat, banyak menemui hambatan. Kemudian masalah penyelesaian Irian Barat, juga menjadi salah satu faktor penyebab jatuhnya Kabinet Natsir. Keterkaitan masalah Irian Barat dengan Jatuhnya Kabinet Natsir akan dijadikan kajian dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, tema perjuangan M. Natsir dalam merebut Irian Barat menarik untuk diteliti. Di tengah situasi politik yang tidak menentu pada masa peralihan RIS ke RI, kebijakan M.

Natsir dalam memperjuangkan Irian Barat sangat diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Langkah Natsir dalam merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda, adalah fokus dari penelitian. Selain itu masalah yang lain yang menarik untuk dibahas adalah, faktor-faktor penyebab jatuhnya Kabinet Natsir.

METODE

Penelitian menggunakan metode penelitian sejarah, untuk menungkap masalah yang akan diteliti. Proses penelitian menggunakan metode ini dibagi menjadi empat tahapan. Tahapan pertama adalah heuristik atau proses pencarian sumber yang diperlukan, yang ada kaitannya dengan perjuangan M. Natsir dalam merebut Irian Barat Tahun 1950-1951.

Sumber utama atau primer diperoleh dari Badan Arsip Nasional Republik Indonesia, dan juga Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sumber data primer yang berhasil ditemukan dalam bentuk, lembaran negara yang tercantum dalam Kabinet Presiden Tahun 1950. Diantaranya berisi tentang surat keputusan Presiden dalam pembentukan Kabinet Natsir. Kemudian data-data lain seperti struktur pemerintahan Kabinet Natsir, program kerja kabinet, serta kebijakan-kebijakan Kabinet Natsir dalam menyelesaikan masalah Irian Barat. Kebijakan yang diambil antara lain pembentukan panitia teknis guna menyelesaikan sengketa Irian Barat, dan juga mengirimkan delegasi Indonesia yang diketuai M. Roem ke Belanda untuk melakukan perundingan dengan Belanda dalam masalah Irian Barat.

Penelusuran sumber dilanjutkan ke Perpustakaan Nasional RI, dimana diperoleh data berupa foto-foto penting yang merekam situasi pada masa terbentuknya Kabinet Natsir. Seperti upacara pelantikan Perdana Menteri Natsir dan anggota parlemen yang tergabung dalam Kabinet Natsir.

Sumber sekunder diperoleh melalui buku yang terdapat di Perpustakaan Daerah Jawa Timur, Perpustakaan Medayu Agung Surabaya, Perpustakaan UNESA, Perpustakaan UNAIR, dan juga beberapa sumber yang diperoleh dari situs internet berupa artikel, koran sejaman, dan juga majalah.

Tema perjuangan M. Natsir terkait kebijakannya dalam merebut Irian Barat pada masa kabinet Natsir ini dipilih, setelah membaca buku M. C. Ricklefs yaitu Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 yang menjelaskan tentang pembentukan kabinet baru setelah RIS, yaitu dengan ditunjuknya M. Natsir sebagai Perdana Menteri. Sebagai pemimpin dalam kabinet, Natsir mengemban tugas mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia dalam waktu yang singkat dari Presiden Soekarno. Karena masa pemerintahan Kabinet Natsir bertepatan dengan satu tahun penyerahan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Kemudian didukung adanya sumber buku

⁵ *Ibid.*, hlm. 170.

⁶ H. Endang Saifuddin Anshari dan M. Amien Rais, 1988. *Pak Natsir 80 Tahun: Pandangan dan Penilaian Generasi Muda*. Jakarta: Media Da'wah. hlm. 68.

Capita Selecta 2 dimana di dalam buku ditemukan kebijakan pembentukan panitia teknis guna menyelesaikan masalah Irian Barat.

Buku yang juga mengupas masalah sejarah politik bangsa adalah buku karya Dr. Anwar Harjono yang berjudul, *Perjalanan Politik Bangsa: Menoleh ke Belakang Menatap Masa Depan*. Buku ini sangat membantu dalam menggambarkan situasi politik tahun 1950-1951. Di dalamnya juga menjelaskan bahwa Kabinet Natsir mendapat banyak pertentangan dari pihak oposisi, terkait kebijakan perundingan dalam menyelesaikan Irian Barat.

Tahap kedua dalam metode penelitian sejarah adalah Kritik sumber. Pada tahap ini dilakukan verifikasi untuk menguji validitas sumber yang telah diperoleh. Sumber tersebut diklasifikasikan menurut sistem dari kategori-kategori yang ada. Misalnya sumber primer berupa lembar negara seperti:

1. Kabinet Presiden RI Tahun 1950-1951 RI No. 1245 tentang keterangan pemerintah atas program Kabinet Natsir.
2. Kabinet Presiden RI Tahun 1950-1951 No. 1247 tentang keputusan Perdana Menteri membentuk panitia teknis guna menangani masalah Irian Barat.
3. Delegasi Indonesia Tahun 1950-1951 No. 1506 tentang rapat pemerintah yang membahas laporan hasil perundingan Delegasi Indonesia dengan Belanda masalah Irian Barat.
4. Kabinet Presiden RI Tahun 1950-1951 No. 267 tentang keputusan Presiden RI atas pengembalian mandat Perdana Menteri Natsir.
5. Kabinet Presiden RI tahun 1950-1951 No. 1260 tentang pengajuan mosi tidak percaya terhadap Kabinet Natsir.

Kemudian sumber-sumber primer yang lain adalah koran sejawan yang diperoleh dari www.kranten.kb.nl, yaitu *Nieuwsblad van het Noorden*, yang menjelaskan bahwa 4 Januari 1950, Indonesia mengirimkan suatu delegasi ke Belanda, untuk melakukan perundingan masalah Irian Barat.

Sumber sekunder diperoleh melalui majalah yang mengisahkan tentang perjalanan hidup M. Natsir, dan juga buku-buku biografi tokoh lainnya yang juga merupakan teman seperjuangan M. Natsir. Tokoh tersebut adalah Mohammad Roem, yang pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pada masa Kabinet Natsir.

Setelah dilakukan klasifikasi sumber, kemudian sumber-sumber tersebut di analisis. Selanjutnya sumber-sumber yang ada dibandingkan satu sama lain agar diperoleh fakta yang menjadi dasar rekonstruksi sejarah. Misalnya membandingkan data mengenai kebijakan M. Natsir yang

memilih jalan perundingan dengan pemerintah Belanda, untuk memecahkan masalah Irian Barat, yang tertulis pada buku *Sejarah Nasional Indonesia Modern 1200-2008*. Jika pernyataan dalam buku sesuai dengan data yang diperoleh yaitu Kabinet Presiden 1950, maka pernyataan tersebut dinyatakan akurat.

Tahapan ketiga merupakan tahap interpretasi sumber. Setelah kritik atas sumber dilakukan, selanjutnya dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap sumber-sumber tersebut. Sumber data yang berhasil diperoleh, dikonfrontasikan satu sama lain sehingga membentuk rekonstruksi fakta sejarah. Akhir dari kegiatan ini, adalah terjawabnya semua rumusan masalah yang kemudian dilanjutkan kepada tahapan yang berikutnya.

Tahap akhir dari penelitian sejarah yaitu historiografi. Historiografi adalah proses merangkai sumber-sumber yang didapat dalam bentuk karya tulis, sehingga sumber yang semula masih terpecah-pecah, menjadi tersusun rapi dalam bentuk cerita sejarah yang menarik untuk dibaca. Setelah tahap rekonstruksi sejarah dalam proses interpretasi, maka dilakukan penulisan akhir sebagai hasil penelitian sejarah yang berjudul, "Perjuangan Mohammad Natsir Dalam Merebut Irian Barat Tahun 1950-1951".

HASIL DAN PEMBAHASAN

M. Natsir memutuskan meletakkan jabatan Menteri Penerangan pada Kabinet Hatta, sebagai bentuk kekecewaannya terhadap hasil KMB. Karena Belanda masih menyisihkan Irian Barat saat penyerahan kedaulatan seluruh wilayah bekas kekuasaannya, sebagai realisasi dari hasil KMB.⁷ RIS merupakan negara bentukan Belanda, jika Natsir menerima jabatan tersebut, sama dengan Natsir mendukung Belanda. Natsir mengkritik pemerintah karena setelah KMB yang menyepakati perubahan bentuk negara kesatuan menjadi negara federal sebagai syarat pengakuan kemerdekaan. Akibat dari keputusan KMB tersebut timbul pergolakan di daerah-daerah, dalam bentuk demonstrasi agar negara-negara bagian bergabung dengan RI Yogya. Semua itu dilakukan untuk mengubah segala apa yang dirasakan rakyat sebagai warisan kolonial. Natsir menunjukkan kekecewaannya dalam sebuah pidato di parlemen pada tanggal 3 April 1950, atau yang lebih dikenal dengan Mosi Integral Natsir.

Berikut adalah akhir dari bunyi dari pidato Natsir di parlemen atau yang terkenal dengan Mosi Integral Natsir:

A. ⁷ Kamaluddin, *Prestasi Monumental: M. Natsir, antara Kepahlawanan dan Proklamator 'Mosi Integral' Bangsa*, www.saripedia.wordpress.com, diakses pada tanggal 31 Oktober 2012.

Memperhatikan:

Suara2 rakjat dari berbagai daerah, dan mosi2 Dewan Perwakilan Rakyat sebagai saluran dari suara2 rakjat itu, untuk melebur daerah2 buatan Belanda dan menggabungkannya ke dalam Republik Indonesia. Kompak untuk menampung segala akibat2 jang tumbuh karenanja, dan persiapan2 untuk itu harus diatur begitu rupa, dan mendjadi program politik dari pemerintah jang bersangkutan dan dari pemerintah R.I.S.

Politik pengleburan dan penggabungan itu membawa pengaruh besar tentang djalannya politik umum di dalam negeri dari pemerintahan di seluruh Indonesia.

Memutuskan:

Menganjurkan kepada pemerintah supaya mengambil inisiatif untuk mencari penyelesaian atau sekurang2 nja menjusun suatu konsepsi penyelesaian bagi soal2 jang hangat jang tumbuh sebagai akibat perkembangan politik di waktu yang achir2 ini dengan tjara integral dan jang program tertentu.⁸

Inti dari Mosi tersebut merupakan kumpulan dari aspirasi semua negara-negara bagian yang setuju mendirikan NKRI. Masing-masing negara bagian tidak setuju dengan bentuk negara federal, karena tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu persatuan bangsa. Bentuk negara federal dianggap sebagai warisan kolonial, yang ingin memecah belah persatuan bangsa. Masing-masing negara bagian juga merupakan bagian integral dari NKRI yang akan dibentuk. M. Natsir menganjurkan kepada pemerintah untuk segera menyusun suatu konsep untuk meyelesaikan masalah yang sedang timbul akibat perkembangan politik yang sedang tumbuh, sebelum masing-masing negara bagian bergolak dan membubarkan diri. Pada 19 Mei 1950 pemerintah RIS dan pemerintah RI mengadakan perundingan di Jakarta dan menghasilkan piagam persetujuan RIS-RI. Berdasarkan hasil sidang tersebut, Kedua belah pihak RI dan RIS setuju dalam waktu singkat bersama-sama melaksanakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh anggota parlemen juga sepakat, dan pada bulan itu juga diputuskan untuk menganjurkan kepada pemerintah untuk mengambil inisiatif untuk mencari penyelesaian, atau setidaknya disusun suatu konsep. Konsep tersebut sebagai usaha penyelesaian soal-soal yang baru tumbuh sebagai akibat perkembangan politik di waktu itu, pemerintah diharapkan segera menyusun program tertentu dengan cara yang integral.

Hasil sidang itu dibacakan di depan anggota rapat gabungan DPR RIS dan Senat, pada peringatan Proklamasi 17 Agustus 1950. Dengan begitu semua

⁸ Mohammad Natsir, 1954. *Capita Selecta* 2. Bandung: W. Van Hoeve. hlm. 7

struktur pemerintahan peninggalan revolusi secara resmi dihapuskan. Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia sebagai unsur di dalamnya, serta negara-negara bagian seperti Sumatra Timur dan Indonesia Timur digantikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru dengan Jakarta sebagai ibukota.

Perdana Menteri M. Hatta yang sudah mengetahui pemikiran M. Natsir dalam sidang kabinet RIS bahkan mengatakan bahwa, "Mosi Integral Natsir akan dijadikan pemerintah sebagai dasar penyelesaian persoalan-persoalan yang sedang dihadapi." Mosi integral Natsir terbukti mampu dan berhasil menegakkan bentuk NKRI secara demokratis dan konstitusional.⁹ Keberhasilan ini kemudian diproklamasikan oleh Presiden Soekarno pada pidato kenegaraan 17 Agustus 1950.¹⁰

Ada dua masalah pokok yang terkandung dalam Mosi Integral Natsir.

1. kritik keras terhadap pemerintah yang bersikap tidak peduli dan sepertinya membiarkan rakyat mencari penyelesaian sendiri tanpa memberikan jalan keluar atas masalah-masalah yang dihadapi.
2. perlunya penyelesaian "integral" atas masalah-masalah serius yang sedang menimpa bangsa Indonesia pada saat itu. Natsir mengkritik pemerintah karena setelah KMB (Konferensi Meja Bundar) yang menyetujui perubahan bentuk negara kesatuan menjadi negara federal sebagai syarat pengakuan kemerdekaan oleh Belanda, ternyata pemerintah kita bersikap pasif. Akibat dari KMB tersebut, juga menimbulkan pergolakan di daerah-daerah yang ditandai dengan banyaknya demonstrasi untuk merombak segala apa yang dirasakan rakyat sebagai akibat dari sistem kolonial.¹¹

Setelah berakhirnya RIS, Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Dengan kembalinya Republik Indonesia ke bentuk Negara Kesatuan, maka pemerintah juga mengalami pergantian. Sejak berlakunya UUDS 1950, sistem parlementer berjalan secara murni.¹² Berbeda dengan sistem parlementer sebelumnya, sistem parlementer yang dibentuk sejak berdirinya NKRI didukung oleh UUD.

⁹ H. Endang Saifuddin Anshari dan M. Amien Rais, 1988. *Pak Natsir 80 Tahun: Pandangan dan Penilaian Generasi Muda*. Jakarta: Media Da'wah. hlm. 68

¹⁰ Kamaluddin, *op. cit.*,

¹¹ *Ibid.*,

¹² DR. Anwar Harjono S.H. 1997.

Perjalanan Politik Bangsa Menoleh ke Belakang Menatap Masa Depan. Jakarta: Gema Insani Press. hlm. 97.

Namun sistem kabinet parlementer hanya dapat dijalankan jika sudah memiliki peralatan yang lengkap seperti Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Ketika sistem parlementer dimulai di Indonesia, bukan rakyat yang memilih langsung, bahkan UUD Pemilihan Umum juga belum ada. DPR pada masa itu, adalah hasil penunjukkan berdasarkan hubungan kerjasama pemerintah dengan para pemimpin partai. Dalam sistem pemerintahan kabinet parlementer, Presiden dapat membubarkan parlemen dengan menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu yang sudah ditentukan menurut undang-undang. Sehingga kabinet yang baru bisa dibentuk berdasarkan perimbangan kekuatan politik yang dihasilkan melalui pemilihan umum.

Pada tahun 1950 Pemerintah RI dijalankan berdasarkan pada sistem demokrasi parlementer.¹³ Dimana pemerintahan berada di tangan Dewan Menteri (kabinet) yang diketuai oleh seorang perdana menteri. Kabinet yang dibentuk mendapat dukungan penuh dalam parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen. Untuk pembentukan kabinet, Presiden berwenang menunjuk seorang atau lebih untuk menjadi formatur kabinet. Tanggung jawab atas pemerintahan ada di tangan kabinet, sehingga Presiden tidak bisa bertindak menyimpang dari kebijakan yang telah dibuat. Presiden Soekarno selama beberapa hari mengadakan rapat dengan para wakil-wakil besar pada saat itu untuk membicarakan komposisi dan program kabinet yang akan dibentuk. Salah satunya adalah membahas, siapa yang akan diberi tanggung jawab untuk membentuknya.

Pada tanggal 21 Agustus 1950, Presiden Soekarno menggunakan hak prerogatifnya dengan menunjuk M. Natsir yang saat itu menjabat Ketua Dewan Eksekutif Masyumi, yaitu partai yang memiliki jumlah wakil yang terbesar di Parlemen (DPR), sebagai Perdana Menteri Pertama RI sekaligus formatur Kabinet. Menurut Presiden Soekarno, Natsir mempunyai pemikiran yang bagus untuk menyelamatkan negara.¹⁴ Tokoh dari Partai Masyumi itu diakui sebagai tokoh yang berjasa dalam membangun dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Peran Natsir mengembalikan Indonesia menjadi negara kesatuan pada tahun 1950 melalui Mosi Integralnya dalam sidang parlemen, tersebut telah mengantarkan M. Natsir menduduki kursi pemerintahan, sebagai Perdana Menteri RI yang pertama.

Dalam pembentukan kabinet baru Natsir mendapat kesulitan melakukan penyesuaian dengan PNI. Kemudian hal ini dilaporkan oleh Natsir kepada Presiden,

yang untuk selanjutnya Presiden memanggil pimpinan PNI untuk membahas hal tersebut. Ternyata Presiden juga mengalami kesulitan yang sama. Untuk mengikutsertakan PNI yang merupakan partai terbesar kedua di parlemen, bersama-sama menyusun program kabinet merupakan hal yang sulit dilakukan.

Sejak menerima mandat sebagai formatur kabinet, Natsir ingin agar kabinet dibentuk dengan dukungan sebanyak mungkin dari partai, dan juga suara di parlemen. Keinginan tersebut untuk memunculkan rasa kesatuan di parlemen, dan kerjasama koalisi antar partai benar-benar terwujud. Akan tetapi Natsir benar-benar mengalami kesulitan menghadapi PNI yang menuntut jabatan sebagai Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan, karena bagi mereka jabatan ini secara politis sangat strategis. Jabatan sebagai Menteri Dalam Negeri dipilih, karena penting untuk menentukan dalam hal pengangkatan Gubernur, Residen, dan Bupati.¹⁵ Jabatan Menteri Pendidikan juga dianggap penting, karena PNI khawatir jika pengaruh Islam akan semakin besar melalui sistem pendidikan di sekolah-sekolah negeri. Selain itu ada pula perbedaan-perbedaan yang lain, terutama menyangkut para tokoh yang akan diangkat dari dua partai terbesar ini, akan sulit disatukan. Berdasarkan perbedaan-perbedaan ini, M. Natsir mendatangi Presiden, dan menawarkan akan mengembalikan mandat sebagai penentu kedudukan kabinet kepada Presiden Soekarno. Akan tetapi tawaran ini ditolak oleh Presiden, dan menginginkan agar M. Natsir mencoba kembali.

M. Natsir sebagai pemimpin partai terbesar dan juga Perdana Menteri, membuatnya memilih suatu sikap. Posisi Masyumi di kabinet harus menunjukkan pengaruh yang kuat, dibandingkan dengan partai-partai lain yang duduk dalam kabinet. PNI memperkirakan bahwa M. Natsir tidak akan berani membentuk kabinet sendirian tanpa PNI. Tetapi pendapat tersebut tidak benar, karena Natsir kemudian menerima tantangan yang diberikan oleh PNI. Akhirnya Natsir membentuk kabinet dengan Masyumi sebagai intinya, dan berkoalisi dengan beberapa partai kecil serta beberapa tokoh politik yang bukan dari partai. Posisi PNI yang berada di luar kabinet, menyebabkan PNI bergabung dengan PKI dan partai Murba sebagai oposisi.¹⁶

Pada Oktober 1950 M. Natsir melaporkan kepada Presiden akan keberhasilannya membentuk kabinet tanpa PNI. Kabinet Natsir disahkan pada tanggal 6 September 1950, dan dilantik oleh Presiden Soekarno pada tanggal 7 September 1950. Mengenai susunan

¹³ DR. Anwar Harjono S.H. hlm. 97.

¹⁴ H. Endang Saifuddin Anshari dan M. Amien Rais, *op. cit.*, hlm. 68.

¹⁵ H. Endang Saifuddin Anshari dan M. Amien Rais, *Ibid.*, hlm. 69

¹⁶ Nieuwsblad van het Noorden, 6 September 1960. hlm. 1.

anggota kabinet disampaikan oleh Perdana Menteri M. Natsir dalam rapat DPR tanggal 21 September 1950. Meskipun telah disahkan dan dilantik pada 7 September 1950, Kabinet Natsir baru bisa bekerja efektif setelah mendapat persetujuan program kerjanya dari parlemen. Dalam sidang yang diadakan pada 25 Oktober 1950, yaitu 118 suara setuju dan 73 suara menolak. Adapun program Kabinet Natsir sebagai berikut:

1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk konstituante dalam waktu yang singkat.
2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang bulat. (pasal 146 U.U.D)
3. Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman.
4. Memperkembang dan memperkokoh kekuatan ekonomi rakyat sebagai dasar bagi melaksanakan ekonomi nasional yang sehat, serta melaksanakan keragaman antara buruh dan majikan.
5. Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas usaha-usaha meninggikan derajat kesehatan dan kecerdasan rakyat.
6. Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang dan memulihkan bekas anggota-anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat.
7. Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat dalam tahun ini.
8. Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif.¹⁷

Program-program di atas disusun untuk menyelesaikan masalah negara yang harus dihadapi Kabinet Natsir. Kemudian pada tanggal 12 September, diadakan acara malam perkenalan kabinet dengan para pemimpin organisasi masyarakat, organisasi politik, dan corps diplomatik. Kabinet ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, pemerintahan mengikuti sistem demokrasi parlementer, yang berarti bahwa kabinet dan menteri bertanggung jawab kepada DPR.

Dalam waktu singkat kabinet ini menuai prestasi. pada tanggal 28 September 1950 dengan suara bulat Indonesia diterima menjadi anggota PBB yang ke-60 dan Sang Saka Merah Putih berkibar di Markas Besar PBB.¹⁸ Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh Moh. Roem yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri untuk menentukan haluan politik pemerintah terhadap luar negeri. Dalam masalah ini Moh. Roem menegaskan

bahwa Indonesia memakai politik bebas dan netral. Bebas dari pengaruh-pengaruh dua blok dunia sedang dalam keadaan Perang Dingin, yaitu Blok Timur dan Blok Barat. Dan beliau percaya bahwa politik itu bisa dijalankan dan dipertahankan.¹⁹

Selama menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Moh. Roem telah dua kali dipercaya oleh Perdana Menteri Natsir menjadi ketua delegasi Indonesia ke Luar Negeri. Pertama, November 1950 saat ia menghadiri sidang PBB di Lake Success setelah Indonesia berhasil diterima menjadi anggota PBB yang ke 60. Setelah resmi menjadi anggota PBB, Indonesia mengirimkan delegasinya secara resmi untuk mengikuti sidang umum di PBB. Saat itu delegasi Indonesia diketuai oleh Moh. Roem, dan wakil ketuanya adalah L. N. Palar. Anggota delegasi Indonesia terdiri dari Dr. Darma Setiawan, Mr. Sujono, Prawoto Mangkusasmito, Mr. Sumanang, dan Mr. Tambunan. Di dalam Sidang Pleno PBB ini Moh. Roem berhasil memperlihatkan kepada dunia internasional mengenai eksistensi RI yang diperjuangkan rakyat Indonesia selama ini.

a. Kebijakan Kabinet Natsir Masalah Irian Barat

Perdana Menteri Natsir menyusun beberapa rencana kerja sebagai upaya memperjuangkan status Karesidenan Irian Barat, serta mengumpulkan bahan-bahan perundingan. Natsir memerintahkan untuk membentuk suatu panitia teknis, guna menyiapkan segala sesuatu yang bersangkutan dengan pelaksanaan hasil-hasil perundingan mengenai masalah status Karesidenan Irian Barat. Tugas panitia teknis adalah menyiapkan segala usaha pemerintah yang akan dilaksanakan sehubungan dengan hasil-hasil perundingan mengenai masalah kedudukan-kenegaraan Karesidenan Irian Barat. Kebijakan tersebut dibacakan Perdana Menteri Natsir dalam rapat ke-10 tanggal 16 Oktober 1950 memutuskan:

1. Membentuk suatu panitia teknis yang berkewajiban menyiapkan segala usaha pemerintah yang akan dilaksanakan sehubungan dengan hasil-hasil perundingan mengenai masalah kedudukan-kenegaraan karesidenan Irian Barat.
2. Terhitung mulai tanggal 16 Oktober 1950 mengangkat:
 1. Dr. Suparmo sebagai Ketua
 2. I. J. Kasimo sebagai Anggota
 3. Mr. Tambunan sebagai Anggota
 4. Ir. Teko Sumodwirjo sebagai Anggota
 5. Letkol. Daan Jahja sebagai Anggota
 6. Mr. Memet Tanimidjaja sebagai Anggota
 7. Kyai H. Masjkur sebagai Anggota

¹⁷ ANRI. Kabinet Presiden RI 1950. No. 1260

¹⁸ Anggota IKAPI, 1986. *Mengenal Kabinet RI Selama 40 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: PT Kreasi Jaya Utama. hlm.70.

¹⁹ Iin Nur Insaniwati, *Mohammad Roem, Karier Politik dan Perjuangannya (1924-1968)*. Googlebook.com. hlm. 100.

8. A.S. Pello sebagai Anggota
9. Silas Papare sebagai Anggota
10. Latumahina sebagai Anggota, dari panitia teknis tersebut di atas.²⁰

Mengenai Irian Barat, Natsir juga telah mengirinkan suatu delegasi²¹ yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Mr. Mohammad Roem, menuju suatu konferensi mengenai Irian Barat yang diselenggarakan di Den Haag sejak 4 Desember 1950. Konferensi Irian yang dimulai pada tanggal 4 Desember 1950, mempunyai dasar dalam pasal 2 dari *Piagam Penyerahan Kedaulatan*, dimana dinyatakan bahwa status politik Irian Barat akan ditentukan dengan jalan perundingan antara Nederland dan Indonesia dalam 1 Tahun setelah penyerahan kedaulatan.²² Masalah Irian adalah peninggalan dari perselisihan Indonesia-Belanda yang belum selesai di Konferensi Meja Bundar.

Hasil dari konferensi Irian di Den Haag tanggal 4 Desember 1950 antara lain sebagai berikut:

1. Tuntutan bangsa Indonesia atas Irian adalah tuntutan yang nyata, baik sebelum maupun sesudah Konferensi Meja Bundar. Namun pihak Delegasi Belanda menyangkal tuntutan tersebut dengan alasan, bahwa Irian bukan bagian dari Indonesia. Hal ini didasarkan pada ilmu pengetahuan, etnografi, rasial, dan sebagainya.
2. Pihak delegasi Indonesia juga menyampaikan alasannya bahwa, perjuangan ini bukan berdasarkan atas persamaan agama, atau persamaan keturunan. Akan tetapi persamaan keyakinan hidup, bahwa suatu bangsa berhak menentukan nasib sendiri. Hak atas tanah air, dan juga hak untuk bernegara yang satu.
3. Terhadap tuntutan ini, Belanda menyatakan bahwa Irian Barat Irian Barat harus tetap menjadi bagian dari negara Belanda. Jika tidak, Belanda akan tetap menjadi negara kolonial di Asia.

Berdasarkan hasil konferensi tersebut, jelas bahwa Belanda sebenarnya tidak ingin menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Tetapi pihak Indonesia tidak menyerah begitu saja. Dilihat dari sisi kerja sama antara Indonesia dan Belanda, mungkin Belanda merasa mempunyai tanggung jawab karena turut berperan memajukan Irian. Akan tetapi Indonesia tidak dapat menerima jika kepentingan Belanda atas Irian, adalah sebagai daerah koloni atau jajahan.

²⁰ ANRI, Kabinet Presiden RI 1950 No. 1247

²¹ *Nieuwsblad van het Noorden*, 4 Januari 1951. www. Kranten.kb.nl.

²² Mohammad Natsir, *Capita Selecta 2*, Op. Cit., hlm. 11.

Pada tanggal 11 Desember 1950, pihak delegasi Indonesia menyampaikan kepada Belanda tentang 7 buah pasal yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan atas Irian Barat, kepada Indonesia. Isi dari 7 buah pasal tersebut antara lain:

1. Di dalam lingkungan kerjasama antara Indonesia dan Nederland di lapangan ekonomi, pemerintah Indonesia mengakui hak dan dan konsesi yang sekarang ada dan akan diberikan perhatian yang istimewa kepada Nederland mengenai pemberian konsesi baru dan menempatkan kapital. Selanjutnya di dalam mengembangkan sumber daya alam di Irian Barat, akan diberikan perhatian yang khusus kepada kepentingan-kepentingan Belanda disana. Antara lain dalam mengusahakan perkembangan kekayaan tanah. Pada umumnya Pemerintah Indonesia bersedia dalam memajukan Irian Barat di lapangan ekonomi, memperhatikan dengan sepenuhnya kepentingan Belanda di Lapangan perdagangan, perkapalan, dan industri.
2. Dalam aparat administrasi di Irian Barat akan dapat dipergunakan tenaga-tenaga Belanda.
3. Pensiun pegawai-pegawai Belanda di Irian akan dijamin seperti dalam persetujuan KMB.
4. Imigrasi rakyat Belanda akan diperbolehkan oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya akan diperhatikan benar-benar supaya diadakan tenaga buruh yang diperlukan untuk Irian Barat.
5. Pemerintah Indonesia akan memajukan supaya Irian Barat dimasukkan ke dalam sistem perhubungan pemerintah Indonesia (perhubungan laut, udara, telepon, telegraf, dan radio), dengan memperhatikan konsesi-konsesi yang sudah diperoleh oleh maskapaai Belanda atau maskapaai campuran.
6. Kemerdekaan agama akan dijamin sepenuhnya dan usaha-usaha dari zending dan misi dalam lapangan kemanusiaan, seperti pengajaran dan pemeliharaan orang sakit dapat diteruskan. Dalam usaha kemanusiaan itu jika diperlukan misi dan zending akan dapat bantuan dari pemerintah Indonesia.
7. Di Irian Barat akan diusahakan supaya pemerintahnya berjalan dengan cara demokrasi yang penuh. Kepada daerah itu akan diberika otonom dan hak ikut memerintah (medebewind). Segera akan dimulai dengan pembentukan badan perwakilan sendiri.²³

Penawaran 7 konsesi tersebut dilakukan pemerintah Indonesia dengan tujuan status kedaulatan Irian Barat akan diberikan, tetapi dengan tidak mengganggu hubungan kerjasama Uni Indonesia-

²³ Mohammad Natsir, *Capita Selecta 2*, *Ibid.*, hlm. 12.

Belanda. Dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada Belanda untuk memajukan Irian Barat, dengan tetap memberikan batasan-batasan tertentu. Pemerintah Indonesia juga bersedia mengadakan persetujuan-persetujuan khusus agar setelah penyerahan kedaulatan atas Irian Barat kepada Indonesia, kepentingan Belanda akan tetap dipelihara.

Mengenai 7 pasal ini, Belanda berpendapat bahwa pasal yang terakhir harus diserahkan kepada rakyat Irian asli. Pendapat ini didasarkan pada hak menentukan nasib sendiri. Dengan hak itu rakyat Irian asli boleh memilih apakah akan bersatu dengan Indonesia, menjadi negara sendiri, atau tetap menjadi bagian dari Belanda. Pendapat ini tidak asing bagi Indonesia, karena dahulu Indonesia memakai teori tersebut saat Belanda akan memecah Indonesia menjadi beberapa negara. Teori yang dulu ditolak dengan tegas oleh Belanda, sekarang digunakan Belanda untuk menuntut Irian Barat. Sehingga perundingan kali ini juga menemui jalan buntu, sebab belum tercapai suatu keputusan yang disepakati bersama. Kedua belah pihak tetap gigih mempertahankan kepentingannya masing-masing.

Pada tanggal 15 Desember 1950, delegasi Indonesia mengadakan pembicaraan lagi dengan pemerintah Belanda. Sampai pada tanggal 23 Desember 1950, pihak delegasi Indonesia mengajukan beberapa konsesi baru, sebagai usaha mendekati pihak Belanda. Hal ini dilakukan karena tanggal 27 Desember semakin dekat, dan penyelesaian status politik Irian belum dapat diselesaikan karena terbatasnya waktu. Isi dari beberapa konsesi baru tersebut adalah:

1. Kedua belah pihak menyetujui tentang penyerahan kedaulatan atas Irian Barat, oleh Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia.
2. Penyerahan itu akan dilangsungkan pada hari yang tertentu yaitu pada pertengahan tahun 1951.
3. Sebelum itu akan diadakan Konferensi untuk membuat perjanjian-perjanjian khusus berdasarkan 7 pasal yang telah dimajukan oleh delegasi Indonesia untuk memelihara kepentingan-kepentingan Belanda di Irian Barat.²⁴

Mengenai konferensi yang akan diadakan itu, tidak ada keberatan internasional yang akan diajukan. Sebab keputusan itu atas persetujuan kedua belah pihak, dengan UNCI sebagai badan internasional. Hingga pada tanggal 26 Desember sore, kembali diadakan sidang penghabisan sebelum tanggal 27. Dalam persidangan itu Belanda menolak tiga konsesi baru yang diberikan delegasi Indonesia. Padahal sebelumnya telah disepakati

bersama oleh kedua belah pihak. Selain itu Belanda masih mengajukan dua buah usul. *Usul yang pertama*, adalah supaya kedaulatan atas Irian Barat diserahkan kepada Uni, sedang Pemerintahan (Beheer) akan tetap di tangan Belanda.

Usul tersebut jelas ditolak oleh Indonesia, karena jika Indonesia menyetujuinya berarti Indonesia telah bekerja sama dengan Belanda untuk menjajah Irian Barat. Selain itu pihak Indonesia menolak dengan tegas, karena hubungan Belanda terhadap Irian Barat, pada dasarnya lain dengan hubungan Indonesia dengan Irian Barat. Belanda jelas-jelas menganggap bahwa Irian adalah daerah koloni, sedangkan bangsa Indonesia yang ada di Irian adalah bangsa yang dijajah oleh Belanda. Pihak Indonesia tidak dapat menerima pernyataan lanjutan dari pemerintah Belanda di Irian Barat, karena Indonesia tidak dapat menyetujui usulan yang diberikan pihak Belanda, yang menurut keyakinan dan pendirian pemerintah Indonesia, Irian adalah bagian dari tanah air Indonesia sendiri. *Usul yang kedua*, bahwa pada saat itu juga pihak Belanda mengajukan untuk melanjutkan perundingan melalui jasa-jasa baik UNCI.²⁵

Pemerintah Belanda tahu bahwa pada tanggal 27 Desember itu adalah hari berakhirnya konferensi. Terhadap dua usul ini pihak delegasi Indonesia berpendapat, bahwa pemerintah tidak harus memberikan jawaban. Karena berdasarkan persetujuan Konferensi Meja Bundar pasal 2 piagam penyerahan kedaulatan, tidak memberikan dasar untuk melanjutkan perundingan. Konferensi ini sudah dapat diakhiri pada tanggal 27 Desember 1950, dengan tidak mencapai hasil yang memuaskan.

A. Kegagalan Usaha Perundingan Dengan Belanda Masalah Irian Barat

Kebijakan membentuk panitia teknis guna menyelesaikan Irian Barat, dengan jalan perundingan dengan Belanda, mendapat serangan-serangan keras dari kelompok partai oposisi di Parlemen. Kebijakan dengan jalan perundingan yang dipilih oleh Natsir untuk membujuk Belanda agar menarik diri dari wilayah Irian Barat, dianggap oleh kelompok oposisi sebagai sikap yang terlalu lunak dan lemah.²⁶

Dalam perundingan itu pihak Indonesia berjanji jika kekuasaan atas Irian Barat diserahkan kepada Indonesia, maka Indonesia akan memberi otonomi dan membentuk Badan Perwakilan Rakyat. Selain itu pihak Indonesia menawarkan konsesi-konsesi yang sangat luas, yaitu eksploitasi bahan tambang, hasil hutan, dan juga jaminan terhadap modal perdagangan, perhubungan, laut,

²⁵ ANRI, Delegasi Indonesia 1950, No.

1506

²⁶ H. Endang Saifuddin Anshari dan M.

Amien Rais, 1988. *Pak Natsir 80 Tahun: Pandangan dan Penilaian Generasi Muda*. Jakarta: Media Da'wah. hlm. 68.

²⁴ ANRI, Delegasi Indonesia 1950, No.

1506

dan industri.²⁷ Seperti diketahui bahwa perundingan yang dilakukan dengan Belanda, tidak menuai hasil yang memuaskan. Belanda menolak berbagai kebijakan yang ditawarkan dan menginginkan untuk mempertahankan Irian Barat dengan menawarkan kepada penduduk asli, akan diadakan pelaksanaan penentuan nasib sendiri. Mereka diberikan kebebasan untuk memilih, apakah bergabung dengan Indonesia, memilih membentuk negara sendiri, atau tetap menjadi bagian dari Belanda.

B. Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Kabinet Natsir Tentang Masalah Irian Barat

Kegagalan perundingan dalam memperjuangkan Irian Barat, menerima kekecewaan dari berbagai pihak. Tanda-tanda jatuhnya kabinet mulai terlihat pada kondisi ini. Kekecewaan masyarakat ditunjukkan dalam bentuk pengajuan mosi tidak percaya yang datang dari beberapa daerah. Mosi yang menyatakan tidak puas dengan kebijakan pemerintahan Kabinet Natsir mengenai masalah Irian Barat adalah:

a. Mosi Tidak Percaya dari Pemuda Demokrat Indonesia Cabang Sumbawa.

Para Pemuda Demokrat Cabang Sumbawa telah mengadakan Konferensi di daerah Sumbawa Besar, dan dihadiri oleh 17 ranting Pemuda Indonesia Demokrat Cabang Sumbawa. Berdasarkan keterangan utusan ranting, mengingat kegentingan situasi politik pada masa itu, sejak tanggal 22 September 1950 sepakat memerlukan adanya pemimpin negara yang kuat dan tegas. Karena pada awal berdirinya Kabinet Natsir, tidak semua rakyat Indonesia mendukung. Mereka juga memutuskan untuk mendesak Presiden supaya mengambil inisiatif membubarkan Kabinet Natsir. Kemudian Presiden juga harus menunjuk format kabinet baru, untuk menyusun kabinet yang lebih kuat dan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia.²⁸

b. Mosi Tidak Percaya dari Pemuda Demokrat Indonesia Cabang Medan.

Mereka juga telah mengadakan Konferensi Pemuda Demokrat Indonesia Cabang Medan yang pertama, dan dilangsungkan pada 7 Januari 1951. Dalam konferensi tersebut mereka membicarakan hal, yaitu kegagalan perundingan memasukkan Irian Barat ke dalam Republik Indonesia sebelum 1 Januari 1951. Mereka juga mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan pada keputusan Konferensi Pemuda Demokrat Indonesia Daerah Sumatera Timur, tanggal 5 sampai 7 November 1950. Mereka menginginkan agar pemerintah mengambil sikap, dalam perjuangan mengembalikan dasar Proklamasi 1 Agustus 1945, dan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi Indonesia. Hal ini disebabkan karena lemahnya Kabinet Natsir menghadapi situasi nasional dan internasional. Dengan demikian Pemuda Demokrat

Indonesia Cabang Medan memutuskan tidak percaya kepada kebijaksanaan Kabinet Natsir, dan menuntut supaya Kabinet Natsir dibubarkan. Dengan pembubaran tersebut, digantikan dengan kabinet yang mampu berjuang dengan program yang revolusioner dan konsekuen anti imperialis. Mereka juga menginginkan agar pemerintah merobek persetujuan KMB, sebagai sambutan atas sikap Belanda sendiri yang telah lebih dulu melanggar persetujuan KMB.²⁹ Dengan diterimanya dua mosi tidak percaya terhadap Kabinet Natsir, menunjukkan bahwa demokrasi berjalan dengan semestinya. Akan tetapi masyarakat sebenarnya tidak harus melakukan itu, karena bagaimanapun kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah demi kepentingan rakyat. Jika dalam prosesnya, kebijakan tersebut menemui kegagalan, maka seharusnya masyarakat tidak buru-buru mengambil keputusan membubarkan pemerintahan. Karena akan berdampak politis bagi pemerintahan selanjutnya, dan juga masalah negara yang lain tidak dapat diselesaikan dengan baik.

Belum selesai masalah tuntutan tersebut, Kabinet Natsir mendapat mosi Hadikusumo dari fraksi PNI, masalah pencabutan PP No. 39 tahun 1950. Di dalam PP tersebut mengatur pembentukan Dewan Eksekutif Daerah, yaitu wakil-wakil partai yang dipilih dari DPRD secara proporsional, didasarkan pada organisasi di daerah-daerah. Akibat diterimanya mosi Hadikusumo, menimbulkan adanya pertentangan antara Kabinet Natsir, dan Parlemen RI, yang didominasi oleh pihak oposisi terutama PNI. Hal yang tidak dapat diabaikan adalah, sikap oposisi Presiden Soekarno terhadap kabinet. Seharusnya dalam sistem parlementer, Presiden dan Kabinet bisa bersatu dan sejalan dalam menjalankan pemerintahan negara. Hanya saja hal ini tidak terjadi pada masa kabinet Natsir. Akhirnya kesenjangan politik ini terpecahkan dengan mundurnya dua menteri dari kabinet pada 20 Maret 1951. Sebelumnya dua menteri juga telah mengundurkan diri, yaitu Menteri Pertahanan dr. Abdul Halim pada 17 Desember 1950, dan Harsono Tjokroaminoto (PSII) pada 31 Desember 1950. Karena sudah tidak mampu lagi menjaga keutuhan kabinetnya, M. Natsir memutuskan untuk mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno pada 20 Maret 1951. Sejak pengunduran dirinya, perjuangan M. Natsir dalam menyelesaikan masalah Irian Barat, untuk kembali ke pangkuan ibu pertiwi, baik secara nasional maupun internasional tidak dapat dilanjutkan.

KESIMPULAN

Sejak masa peralihan dari RIS ke RI, Indonesia sudah mempunyai lembaga negara demokratis, seperti Kepala Negara, Kabinet, Parlemen, dan pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan yang tersulit di dunia yang justru digunakan di Indonesia setelah masa revolusi. Di sisi lain, Indonesia belum

²⁷ Sri Hardiman, 1995. *Kembali ke UUD 1945 Mengantar Perjuangan Pembebasan Irian Barat ke Wilayah Republik Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. hlm. 19

²⁸ ANRI, Kabinet Presiden 1950-1951 RI. No.

²⁹ ANRI, Kabinet Presiden 1950-1951 RI. No.

memiliki parlemen rakyat karena Undang-undang pemilihan umum belum terbentuk. Parlemen yang ada merupakan hasil penunjukan, berdasarkan pemilihan kepercayaan dari negara-negara RIS. Sehingga kabinet pada waktu itu kedudukannya sangat rapuh, dan tidak sedikit program yang belum terselesaikan. Dalam satu masa peralihan, antara masa revolusi dengan masa penertiban dan pembangunan, tidak mudah bagi seseorang untuk berpindah dari cara berfikir revolusioner ke arah pemikiran demokratis. Adanya kerjasama penyusunan struktur negara, antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan. Masalah Irian Barat resmi muncul setelah diadakannya Konferensi Meja Bundar. Hasil dari KMB tersebut menyatakan bahwa Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia, meliputi seluruh wilayah bekas jajahan Belanda kecuali Papua.

Sejak pemulihan kedaulatan yang terjadi tanggal 27 Desember 1949, Irian Barat dengan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Belanda, berada dalam kekuasaan Kerajaan Belanda. Untuk sementara, status Irian Barat masih akan dirundingkan bersama dalam waktu satu tahun, sejak pemulihan kedaulatan RIS oleh pemerintah Belanda. Tetapi ternyata dalam perkembangannya Irian Barat merupakan daerah sengketa antara Indonesia dan Belanda, yang mengakibatkan persengketaan panjang, dan berlarut-larut antara Indonesia dengan Belanda. Pemerintah Indonesia melakukan usaha-usaha lain untuk mencari pemecahan persoalan status Irian Barat, melalui perundingan langsung antara Indonesia dan Belanda. Perundingan tersebut dilakukan dalam hubungan Uni Indonesia-Belanda, dimana kedua anggota mempunyai kedudukan yang sama sebagai negara merdeka. Dalam suatu Konferensi Uni Indonesia-Belanda, sejak tanggal 25 Maret sampai 1 April 1950 di Jakarta, mulailah diambil langkah pertama untuk memecahkan masalah Irian Barat. Sebagai langkah awal Konferensi, pemerintah membentuk sebuah komisi gabungan yang ditugaskan untuk melakukan peninjauan ke Irian Barat. Komisi tersebut diharapkan mampu menyelesaikan laporan kepada Uni dalam waktu tiga bulan, untuk dijadikan bahan perundingan masalah Irian Barat pada rapat Uni selanjutnya. Bulan Agustus 1950, komisi gabungan itu membuat laporan yang masing-masing bagian membuat laporan sendiri secara terpisah.

Laporan masing-masing komisi itu berupa pemantauan kondisi penduduk Irian Barat, dan juga kegiatan para pejabat Belanda yang ada di Irian Barat. Berdasarkan hasil peninjauan komisi gabungan bagian Irian, ternyata selama bertahun-tahun pemerintah Belanda melakukan kolonisasi, tidak banyak merubah kondisi masyarakat Irian Barat. Mereka tetap memakai kodeka, dan juga masalah penanganan penyakit Malaria, masih belum ditangani. Berbeda sekali dengan pernyataan Belanda, yang ingin memajukan wilayah Irian. Sementara itu, Menteri Urusan Uni dan Seberang Lautan Belanda Mr. Van Maarseven berbicara di Majelis Tinggi Belanda. Dalam pembicaraannya tersebut menyatakan bahwa setelah satu tahun dari penyerahan kedaulatan kepada RIS, Irian Barat harus tetap di bawah Belanda. Ia beralih bahwa hal itu demi kepentingan

rakyat Irian Barat sendiri. Berdasarkan hal ini, niat Indonesia untuk mempertahankan Irian Barat menjadi semakin kuat.

Pada masa-masa ini M. Natsir lebih banyak menunjukkan sifat-sifat kenegaraannya, dibandingkan ideologinya. Natsir menunjukkan ketidakpuasannya terhadap hasil Sidang KMB, dengan meletakkan jabatannya Sebagai Menteri Penerangan RIS. Hal ini disampaikannya melalui Mosi Integral, dalam pidatonya di parlemen. "Mosi Integral Natsir" ternyata bermanfaat untuk mengembalikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian bukan saja memulihkan kesatuan Bangsa Indonesia, tetapi juga memulihkan kesatuan bangsa Indonesia, serta sebagai syarat pembinaan bangsa dan negara pada masa mendatang. Inilah yang kemudian mengantarkan M. Natsir, menduduki kursi sebagai Perdana Menteri pertama NKRI tahun 1950.

Setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, maka pada tanggal 7 September 1950 M. Natsir dilantik menjadi Perdana Menteri. Salah satu program Kabinet Natsir adalah, memperjuangkan masalah status Kresidenan Irian Barat. Kebijakan Natsir dalam masalah Irian Barat antara lain:

1. Dibentuk suatu panitia penyidik, guna melakukan penyelidikan di Irian Barat. Laporan mereka akan dijadikan bahan dalam perundingan masalah Irian Barat dengan Belanda di Den Haag.
2. Pada tanggal 4 Desember sampai 27 Desember 1950, M. Natsir mengirimkan delegasi Indonesia, untuk melakukan perundingan dengan Belanda di Den Haag.
3. Dalam perundingan itu, pihak Indonesia berjanji jika Belanda menyerahkan kekuasaan atas Irian Barat, Indonesia akan memberi otonomi dan membentuk Badan Perwakilan Rakyat kepada Irian Barat.
4. Selain itu pihak Indonesia juga menawarkan konsesi-konsesi yang sangat luas, yaitu eksploitasi bahan tambang, hasil hutan, serta jaminan terhadap modal, terutama modal perdagangan, perhubungan laut, dan industri.

Belanda tidak dapat menerima usul tersebut, dan lebih memilih mempertahankan Irian Barat. Belanda juga menawarkan beberapa usulan yaitu:

1. kedaulatan atas Irian Barat diserahkan kepada Uni, sedang Pemerintahan (Beheer) akan tetap di tangan Belanda.
2. adanya pelaksanaan penentuan nasib sendiri, yang terbatas pada penduduk pribumi saja. Hal ini dilakukan di bawah pengawasan kedua belah pihak.

Tawaran tersebut tidak dapat disetujui oleh Indonesia, karena hal tersebut menandakan bahwa kemerdekaan Indonesia belum utuh, dan seolah-olah Irian Barat berada dalam wilayah jajahan Belanda dan Indonesia. Setelah usaha penyelesaian Irian Barat melalui jalan perundingan dengan Belanda mengalami kegagalan, Kabinet Natsir mendapat serangan-serangan keras dari kelompok partai oposisi di Parlemen. Jalan perundingan yang dipilih oleh M. Natsir untuk membujuk Belanda, agar menarik diri dari wilayah Irian Barat

dianggap oleh kelompok oposisi sebagai sikap yang terlalu lunak dan lemah. Seperti diketahui bahwa perundingan yang dilakukan dengan Belanda mengenai masalah Irian Barat, menemui jalan buntu. Dengan kegagalannya memperjuangkan Irian Barat, Kabinet Natsir menerima mosi tidak percaya dari beberapa golongan, diantaranya Persatuan Pemuda Indonesia Cabang Medan, dan juga Cabang Sumbawa. Dalam mosi tersebut, mereka menyatakan tidak percaya terhadap kebijakan Kabinet Natsir, dan juga meminta agar Presiden membentuk Kabinet baru yang lebih kuat.

Belum selesai masalah tuntutan tersebut, Kabinet Natsir mendapat mosi Hadikusumo dari fraksi PNI, masalah pencabutan PP No. 39 tahun 1950. Di dalam PP tersebut mengatur pembentukan Dewan Eksekutif Daerah, yaitu wakil-wakil partai yang dipilih dari DPRD secara proporsional, didasarkan pada organisasi di daerah-daerah. Akibat diterimanya mosi Hadikusumo, menimbulkan adanya pertentangan antara Kabinet Natsir, dan Parlemen RI, yang didominasi oleh pihak oposisi terutama PNI. Hal yang tidak dapat diabaikan adalah, sikap oposisi Presiden Soekarno terhadap kabinet. Seharusnya dalam sistem parlementer, Presiden dan Kabinet bisa bersatu dan sejalan dalam menjalankan pemerintahan negara. Hanya saja hal ini tidak terjadi pada masa kabinet Natsir. Dan akhirnya kesenjangan politik ini terpecahkan dengan mundurnya dua menteri dari kabinet pada 20 Maret 1951. Sebelumnya dua menteri juga telah mengundurkan diri, yaitu Menteri Pertahanan dr. Abdul Halim pada 17 Desember 1950, dan Harsono Tjokroaminoto (PSII) pada 31 Desember 1950. Karena sudah tidak mampu lagi menjaga keutuhan kabinetnya, M. Natsir memutuskan untuk mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno pada 20 Maret 1951.

SARAN

Penulisan karya ilmiah tentang Perjuangan M.Natsir Dalam Merebut Irian Barat ini merupakan sarana bagi pembaca agar bisa menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh para pahlawan yang telah berjuang demi tercapainya kemerdekaan Indonesia selain itu juga diharapkan supaya penulisan tentang M. Natsir bisa terus dikembangkan karena tidak hanya terbatas hanya pada Irian Barat saja tetapi juga pemikiran-pemikiran M. Natsir yang lainnya seperti masalah agama dan negara

DAFTAR PUSTAKA**Sumber Buku**

- Ajip Rosidi. 1986. *Sjafrudin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Anggota IKAPI Jakarta, 1986. *Mengenal Kabinet RI Selama 40 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: PT Kreasi Jaya Utama.
- Ahmad Suhelmi, Drs. MA. 1999. *Soekarno versus Natsir: Kemenangan Barisan Megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler*, Jakarta: Darul Falah.
- Anwar Harjono, Dr. 1997. *Perjalanan Politik Bangsa: Menoleh Ke Belakang Menatap Masa Depan*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Endang Saifuddin A. dan M. Amien Rais. 1998. *Pak Natsir 80 Tahun: Pandangan dan Penilaian Generasi Muda*, Jakarta Pusat: Media Dakwah.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 7*. 1988. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka
- Iin Nur Insaniwati, *Mohammad Roem, Karier Politik dan Perjuangannya (1924-1968)*. Googlebook.com
- Marwati Djoened P. dan Nugroho Notosusanto. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta: PN Balai Pustaka.
- M. Cholil, 1979. *Sejarah Operasi-Operasi Pembebasan Irian Barat*, Jakarta: Departemen Pertahanan-Kemampuan Pusat Sejarah ABRI.
- M. C. Ricklefs. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi.
- Mohammad Natsir. 1954. *Capita Selecta Jilid 2*, Bandung: W. Van Hoeve.
- Panitia Buku Peringatan Muhammad Natsir/ Mohammad Roem 70 Tahun, 1978. *Muhammad Natsir 70 Tahun Kenang-Kenangan Kehidupan dan Perjuangan*, Jakarta: Pustaka Antara.

Sri Hardiman, 1995. *Kembali ke UUD 1945 Mengantar Perjuangan Pembebasan Irian Barat ke Wilayah Republik Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Suyatno Hadinoto dkk, 1986. *Api Perjuangan Pembebasan Irian Barat*, Jakarta: Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintis Irian Barat.

The Liang Gie dan F. Soegeng Istanto, 1968. *Pertumbuhan Pemerintahan Irian Barat dan Kemungkinan-Kemungkinan Perkembangan Otonominya di hari Kemudian*, Jilid I, Jogjakarta: Seksi Penerbitan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada.

Arsip

- Kabinet Presiden RI No. 1245 tentang keterangan pemerintah atas program Kabinet Natsir.
- Kabinet Presiden RI No. 1247 tentang keputusan Perdana Menteri membentuk panitia teknis yang menangani masalah Irian Barat.
- Delegasi Indonesia No. 1506 tentang rapat pemerintah laporan hasil perundingan Delegasi Indonesia dengan Belanda masalah Irian Barat.
- Kabinet Presiden RI No. 1260 tentang pengajuan mosi tidak percaya terhadap Kabinet Natsir.
- Keputusan Presiden No. 267 tentang keputusan Presiden RI atas pengembalian mandat Perdana Menteri M. Natsir.
- Penyelesaian Persengketaan Irian Barat*, Rentjana Pendirian Komisi-Gabungan Irian Barat Bagian Komisi Indonesia, diangkat oleh kedua Negara-Peserta Uni Indonesia-Belanda oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat 1950. Diselesaikan dan ditandatangani di bandar Schveningen pada hari Selasa, tgl 1 Agustus 1950.

Koran

Nieuwsblad van het Noorden, 4 Januari 1951.